

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Kode Pas 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581

SEMINAR HASIL PENELITIAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMAA



**PALEMBANG
17 MARET 2017**

PENGARUH FAKTOR KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, FAKTOR AKUNTANSI, DAN FAKTOR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Widia¹, Verawaty²,
Universitas Bina Darma^{1,2}
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang
Sur-el: widyaiffny@gmail.com¹, verawaty@binadarma.ac.id²,

Abstract: *This study aims to examine empirically the effect of budget goal clarity, the factors accounting (accounting controls and reporting systems) and obedience to the laws of the government performance accountability Palembang. This study used a questionnaire to data dissemination. In this study, samples taken are 30 people involved in financial administration section of Palembang City Government Secretariat. Data collected through direct observation and survey obtained by means of the distribution of questionnaires to the respondents. This study uses a model of multiple linear regression analysis with SPSS 22.0 software. The results showed that the budget goal clarity, reporting and compliance with laws and regulations affect the performance accountability of government agencies. Control of accounting does not affect the performance accountability of government agencies.*

Keywords: *Clarity Target Budget, Accounting Controls, Reporting Systems, Adherence to the Rule of Law, Government Agencies Performance Accountability.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran, faktor akuntansi (pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan) dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk menyebarkan data. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 30 orang yang terlibat dalam bagian administrasi keuangan SETDA Pemerintah Kota Palembang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada para responden. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: Kejelasan Anggaran Target, Akuntansi Kontrol, Sistem Pelaporan, Kepatuhan Terhadap Aturan Hukum, Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut.

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan serta ketaatan dalam peraturan perundangan yang baik maka dengan perubahan yang terarah dapat terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Selain itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran pemerintahan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance*

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH FAKTOR KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, FAKTOR AKUNTANSI, DAN FAKTOR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Objek Penelitian

Objek yang menjadi penelitian adalah Pemerintah Kota Palembang khususnya pegawai Kantor Bagian Sekretariat Pemerintah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No.1 Palembang.

2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012), menyatakan bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya. Penelitian ini terdiri dari dua operasional variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen yang dijelaskan bahwa variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (Sanusi, 2014).

2.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kuantitatif. Pemilihan teknik analisis kuantitatif adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam penelitian ini. Untuk menguji hubungan tersebut penulis melakukan uji statistik menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Teknik analisis dalam program SPSS untuk menganalisis hasil kuesioner adalah analisis regresi berganda.

2.4 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku atau generalisasi (Sugiyono, 2012).

2.5. Pengujian Kualitas Data

2.5.1 Uji Kualitas Data

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel dimana $df = n-2$ (*degree of freedom*) dengan taraf signifikan 5%. Jika $r \text{ tabel} < r \text{ hitung}$ maka valid.

2.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Sanusi (2014), regresi linier berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang ditetapkan agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak biasa. Pendeteksian terhadap multikolonieritas dapat dilakukan dengan nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat gejala multikolonieritas yang tinggi.

2.6 Tinjauan Pustaka

2.6.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Halim dan Abdullah (2006), teori keagenan merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lainnya disebut dengan agen.

2.6.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Halim dan Iqbal (2012), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2.6.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Halim dan Iqbal (2012), anggaran perlu disusun untuk mencegah terjadinya *underfinancing* atau *overfinancing*

dimana keduanya dapat menurunkan efisiensi dan efektivitas unit kerja pemerintah daerah.

2.6.4 Pengendalian Akuntansi

Menurut Halim dan Iqbal (2012), pengendalian adalah proses keterbukaan melakukan kontrol terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi. Sistem pengendalian akuntansi menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja).

2.6.5 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.

2.6.6 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Salah satu reformasi dalam manajemen keuangan pemerintah adalah dalam bidang penganggaran yaitu ditetapkannya anggaran kinerja sebagai basis penganggaran bagi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 14.

2.6.7 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah

Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dengan demikian peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui

konsistensi temuan penelitian kejelasan sasaran anggaran ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H_1 : *Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah*

Pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dengan demikian peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian pengendalian akuntansi ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H_2 : *Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*

Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dengan demikian peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian sistem pelaporan ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H_3 : *Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*

Pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah

Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dengan demikian peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian ketaatan pada

peraturan perundangan ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H_4 : *Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*

3. HASIL

3.1 Data Penelitian

3.2 Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan

3.2.2 Uji Kualitas Data

3.2.2.1 Uji Validitas

Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel dimana $df = n-2$ (degree of freedom) dengan taraf signifikan 5%. Jika r tabel $< r$ hitung maka valid. $df = 30-2=28$. Pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 diperoleh angka r tabel = 0,374. Jadi angka yang dihasilkan harus lebih besar dari angka 0,374 maka angka/data tersebut dapat dikatakan valid. Seperti dibawah ini ringkasan data proses uji validitas yang semuanya terdapat 30 responden.

Tabel 1. Uji Validitas

Case Processing Summary

	N	%
Case Valid	30	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

3.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas setiap variabel yaitu metode *Alpha Cronbach*. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai $\alpha > 0,60$.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,940	35

3.2.3 Uji Asumsi Klasik

3.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku.

3.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Model regresi yang diajukan untuk variabel independen semuanya terbebas dari multikolinearitas ini terlihat dari hasil pengolahan data yang menunjukkan variabel independen memiliki nilai $VIF < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.2.3.3 Uji Heterokedasitas

Dengan melihat $N=30$ dan $t=0,05$ maka diperoleh 1,697. Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode glesjer diperoleh t hitung lebih kecil t tabel dan nilai signifikansi lebih besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.3 Pengujian Hipotesis

3.3.1 Uji Signifikan Secara Parsial (Uji t)

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ dan hipotesis H_{a1} diterima. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh $> 0,05$ dan hipotesis H_{a2} ditolak. Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ dan hipotesis H_{a3} diterima. Ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh $> 0,05$ dan hipotesis H_{a4} diterima.

Dari tabel di atas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut :

$$Y = -3,840 - 0,522 X_1 + 0,340 X_2 + 1,562 X_3 + 0,786 X_4 + 2,271e$$

3.3.2 Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0.000. berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas $<$

0,05, maka H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan pada peraturan perundangan secara serempak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan $F = 0.000 < 0,05$. Sehingga jika kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan pada peraturan perundangan secara bersama-sama meningkat, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat.

3.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil menunjukkan bahwa nilai R square yang diperoleh sebesar 0,953 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada pada Pemerintah Kota Palembang dipengaruhi oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 95,3%, dan sisanya 4,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dengan melihat nilai koefisien yang tinggi menunjukkan pengaruh variabel – variabel independen terhadap variabel dependen yang juga tinggi yaitu sebesar 95,3%.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Hasil Uji Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara kejelasan sasaran anggaran

sebagai X_1 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel Y menunjukkan bahwa t hitung sebesar 2,128 dengan nilai signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,522 menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.4.2 Hasil Uji Pengaruh Pengendalian Akuntansi (X_2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara pengendalian akuntansi sebagai X_2 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel Y menunjukkan bahwa t hitung sebesar 1,189 dengan nilai signifikansi sebesar $0,245 > 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,340 menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.4.3 Hasil Uji Pengaruh Sistem Pelaporan (X_3) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara sistem pelaporan sebagai X_3 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel Y menunjukkan bahwa t hitung sebesar 7,768 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 1,562 menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh dan signifikan

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.4.4 Hasil Uji Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X_4) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara ketaatan pada peraturan perundangan sebagai X_4 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel Y menunjukkan bahwa t hitung sebesar 3,883 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,786 menunjukkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.4.5 Perbandingan Antara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban dan menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengaruh Faktor Kejelasan Sasaran, Faktor Akuntansi, dan Faktor Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang hasil, yang peneliti sajikan dalam Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Hipotesis kedua pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kondisi dimana pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan pengendalian akuntansi yang dilakukan untuk mengembangkan akuntabilitas kinerjanya menjadi lebih baik lagi.
3. Hipotesis ketiga sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Adanya sistem pelaporan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pada suatu instansi pemerintah.

4. Hipotesis keempat ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ketaatan pada peraturan perundangan yang dilakukan semakin baik atau besar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menandakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, Novi. 2012. *Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anjarwati, Mei. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD se-Kabupaten, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang)*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
- Arifin, Beni. 2012. *Pengaruh Partisipasi anggaran, kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi*. Accounting Analysis Journal Vol. 13 No. 1, hal.15-27. Yogyakarta.
- Cefrida, Mentari. 2014. *Pengaruh kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, dan Ketaatan pada peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru*. Accounting Analysis Journal, Vol. 1 no. 2 Oktober 2014, Hal.1-15. Pekanbaru.
- Fatmala, Juanita. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan masalah keagenan pemerintah daerah (sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 1, hal 53-64.
- Hasanah, Nurmalia dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: In Media.
- Haspiarti, 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintahan Kota Parepare)* Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Hasanuddin. Makassar.
- Herawaty, Netty. 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol.13, N.2, Hal.31-36. Jambi.
- Indudewi, Dian. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Kabupaten Brebes*. Skripsi. Universitas Semarang
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Provinsi Jateng*. Tesis. Program Pasca Sarjana: UNDIP.

- Paramitha, Ida ayu dan Gayatri. 2016. *Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Pengendalian Manajerial, Sektor Publik, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja*. Accounting Analysis Journal, Vol.16.3. September (2016), Hal. 2457-2479. Bali.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No.5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013-2018.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 8 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No.8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Perubahan bataswilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan Kabupaten Daerah II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Walikota Palembang No.19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan.
- Peraturan Walikota Palembang No.29 Tentang RKPD Tahun Anggaran 2015.
- Permendagri No. 21 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pusdiklatwas BPKP. 2011. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Keenam (Revisi Kelima). Bogor.
- Raharjo, Eko. 2007. *Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi*. Fokus Ekonomi, Vol. 2 No. 1 Juni: 37-46
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014. tentang Pemerintah Daerah
- Riantiarno, Reynaldi dan Nur Azlina. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)*. Pekbis Jurnal, Vol.3, No.3, November 2011, Hal. 560-568
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sasongko, Catur dan Safrida Rumondang, 2010. *Anggaran*. Salemba Empat: Jakarta.
- Setiawan, Eko. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*. Jurnal Penelitian Akuntansi, Hal.1-14. Universitas Riau
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna V.2015. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit: Pustaka Baru Press
- Sumiati. 2012. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)*. Tesis S-2. Universitas Riau.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
<http://www.palembang.go.id/v1/2016/08/30>
 diakses tanggal 28 Oktober jam 10.30 pagi.
 (<http://beritamusi.co.id/2016/08/30/apbd-perubahan-kota-palembang-meningkat-rp-200-m/>) diakses tanggal 28 Oktober 2016 jam 10 pagi.